# BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA**

* 1. Literatur Reviu

Penulis membagi penelitian menjadi beberapa pembahasan. Literatur Reviuatau *Literatur Review* adalah bagian dari tulisan akademis yang menunjukkan pengetahuan dan pemahaman tentang literatur akademis tentang topik tertentu yang ditempatkan dalam sebuah konteks. Tujuan *Literature Review* untuk membantu penulis dalam menjelaskan variable bebas, variable terikat serta keterkaitan antara kedua variable tersebut yang mencakup teori dan bukti yang ada. Penulisan karya ilmiah dalam hal ini adalah skripsi, sangat terbantu dengan adanya *Literature Review* karena membantu memudahkan penulis untuk meneliti. Selain fungsi tersebut, *Literature Review* berfungsi untuk menghindari tindakan plagiarisme.

Terdapat beberapa artikel atau jurnal yang dijadikan oleh penulis sebagai referensi dalam menyelesaikan penelitian ini, diantaranya:

**Reviu 1:** Artikel yang ditulis oleh Gerald E. Connolly pada tahun 2017 yang berjudul ***“NATO and Security in the Arctic”***.

Dalam artikel ini dijelaskan bahwa kawasan Arktik memang sudah menjadi pusat kompetisi strategis semenjak perang dingin. Karena perubahan iklim yang terjadi pada saat ini, menimbulkan persaingan geopolitik di kawasan Arktik. Connolly berargumen bahwa hal ini dapat memicu ketegangan antara Rusia dan NATO. Selain itu dengan adanya keterlibatan China di kawasan, menjadikan Arktik sebagai arena persaingan yang strategis. Ketagangan semakin meningkat karena Rusia yang bersikap asertif dan terkesan invasi terhadap wilayah Arktik dengan meningkatkan kehadiran militer di wilayah tersebut yang mengganggu negara-negara di sekitar Arktik. Negara-negara yang berbatasan langsung dengan Samudra Arktik seperti Amerika Serikat, Kanada, Norwegia, Denmark merupakan anggota dari NATO. Oleh karena itu, ketegangan di kawasan Arktik telah mencapai pada konsensus umum tentang pentingnya kawasan Arktik bagi keamanan Aliansi NATO.

Connolly menyebutkan bahwa hubungan antar negara di kawasan Arktik diatur oleh UNCLOS. Hal ini bertujuan untuk mengatasi resiko terkait peningkatan aktivitas pengiriman. *International Maritime Organization* (IMO) telah menetapkan aturan kapal yang beroperasi di perairan Arktik dan Antartika yang berlaku mulai 1 Januari 2017. Meskipun demikian, akibat perubahan iklim yang terjadi, negara-negara di kawasan Artik terutama Rusia melakukan klaim teritorial yang menimbulkan tantangan besar bagi negara-negara kawasan Arktik. Ada beberapa ketegangan yang terjadi terkait klaim wilayah yang dilakukan Rusia. Seperti melakukan sengketa di *Lomonosov Ridge* yang menyebabkan ketagangan hubungan diplomatik antara Rusia, Denmark, dan Kanada.

Hal ini dilakukan Rusia karena dengan perubahan iklim yang terjadi, penurunan es laut menyebabkan adanya potensi atau peluang jalur transportasi darat dan laut yang terintegrasi seperti rute pelayaran antara Eropa dan Asia dengan nama *Northern Sea Route* (NSR). Rute perjalanan ini dapat mengurangi perjalanan waktu dari Eropa ke Asia hampir 40% serta pengurangan biaya pengiriman. Namun hal ini juga masih menjadi pertimbangan karena NSR dapat dijadikan jalur pengiriman apabila es yang berada di perairan Arktik terus mencair dan diperkiran pada tahun 2040. Negara-negara non-Arktik juga memiliki minat besar dalam kawasan Arktik karena dinilai memiliki peluang dari aspek Ekonomi, Pelayaran, Penangkapan Ikan dan Energi. Hal ini tentu menciptakan tantangan geopolitik baru yang harus dikelola secara ter-struktur. NATO merespon tindakan asertif Rusia karena terdapat nilai provokativ di wilayah pinggiran NATO. Tentu NATO merespon hal tersebut dengan memperkuat struktur pertahanan NATO di wilayah Arktik. Selain itu, meskipun tidak ada peran formal NATO dengan Kutub Utara, pada KTT Warsawa Juli 2016, Aliansi menegaskan kembali kesediaannya untuk meningkatkan keamanan di semua perbatasannya, termasuk di Atlantik Utara. Komitmen NATO untuk memperkuat postur maritim di Atlantik Utara untuk mencegah dan mempertahankan diri dari segala potensi ancaman, termasuk terhadap jalur komunikasi laut dan pendekatan maritim NATO (Connolly, 2017)

**Reviu 2:** Artikel yang ditulis oleh Syinthia Fawaati & Idjang Tjarsono pada tahun 2020 yang berjudul ***“*Strategi Rusia Melalui *Russia’s New Arctic Strategy* (2008-2013)”.**

Dalam artikel tersebut menjelaskan bahwa tindakan Rusia di kawasan Arktik didukung dengan adanya perubahan iklim global. *Russia’s New Arctic Strategy* dapat dilihat dalam sebuah dokumen dengan yang berjudul *The Foundations of the Russian Federation State Policy in the Arctic untul 2020 and beyond* yang dikeluarkan pada tahun 2008. Dalam dokumen tersebut menjelaskan bahwa peningkatan berbagai aktivitas di Samudra Arktik dikarenakan wilayah tersebut sudah diprioritaskan oleh Rusia. Kebijakan tersebut menggambarkan bahwa Rusia memiliki tujuan yang signifikan di Samudra Arktik untuk masa depan Rusia. Realisasi kebijakan Rusia dibagi dalam tiga tahap yang mencakup rentang waktu tahun 2008-2010, 2011-2015, dan 2016-2020. Didalam dokumen tersebut memberikan bidang-bidang prioritas kebijakan Rusia yang meliputi pembangunan Sosial-Ekonomi, Keamanan Wilayah, Keamanan Lingkungan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Kerjasama Internasional.

Samudra Arktik mampu menghasilkan sekitar 20% dari PBD (Produk Domestik Bruto) Rusia dan 22% ekspor Rusia. Tentu hal ini menjadi alasan mengapa Arktik dijadikan sebagai wilayah prioritas bagi Rusia. Rusia juga akan membuat rute perdagangan di utara yang diharapkan dapat menjadi jalur pelayaran komersial bagi Rusia dan adanya keinginan Rusia untuk memberlakukan regulasi khusus bagi pelayaran asing yang melewati rute tersebut, sehinga standar persyaratan tersebut ditentukan oleh Rusia dan memberikan keuntungan bagi Rusia. Rusia juga telah mengembangkan hukum standar keselamatan dan lingkungan nasional di wilayah Arktik sehingga memperkuat pemerintah Rusia atas rute tersebut.

Dalam jurnal ini dijelaskan juga bahwa pada tahun 2012, Rusia membentuk sebuah unit untuk Samudra Arktik untuk memberikan dukungan logistik dan administrasi terhadap armada Rusia. Unit ini terdiri dari 15.000 staf. Pada tahun 2011, Rusia juga menciptakan brigade militer khusus terhadap Samudra Arktik yang telah ditempatkan di Penchenga, Kota Penisula. Pelaksaan latihan militer Rusia sudah dimulai sejak tahun 2009 dengan melibatkan sebanyak 8000 hingga 10.000 personil militer dan lebih dari 7000 personil militer melakukan latihan di zona pengujian militer Laut Barents.

Selain itu, Fokus kepentingan nasional Rusia di Samudra Arktik dicapai melalui strategi yang meliputi strategi sumber daya alam, rute laut utara, strategi keamanan wilayah dan strategi keamanan lingkungan. Upaya ini dilakukan dengan tujuan memperoleh hak untuk mengeksplorasi kekayaan alam di Samudera Arktik mengingat wilayah tersebut memiliki sumber daya alam potensial yang melimpah dan Rusia memiliki wilayah yang luas di Samudera Arktik. Rusia juga akan mendapatkan wilayah Rute Laut Utara yang berada di luar ZEE-nya sehingga keberadaan regulasinya bisa diterapkan di seluruh wilayahnya tersebut. Jika Rute Laut Utara dapat sepenuhnya dimiliki oleh Rusia, maka Rusia dapat memainkan peran penting dalam memanfaatkan potensi ekonomi dari penetapan regulasi tersebut (Tjarsono & Si, 2020)

**Reviu 3:** Artikel yang di tulis oleh Helga Haftendorn pada tahun 2011 yang berjudul **“*NATO and the Arctic: is the Atlantic alliance a cold war relic in a peaceful region now faced with non-military challenges?*”.**

Fokus utama NATO adalah menjaga kedaulatan atas wilayah Arktik mereka dan mendapatkan bagian yang adil dalam eksploitasi sumber daya daerah. Karena NATO berkomitmen untuk melindungi lingkungan Arktik dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk asli di Arktik. Dengan melakukan itu, mereka mencoba memadukan militer kesiapsiagaan dengan kerjasama yang ditingkatkan. Karena lima dari delapan negara Arktik adalah anggota NATO, Aliansi menawarkan diri untuk mengkoordinasikan tanggapan mereka terhadap keamanan Arktik. Selain misi militernya, NATO memiliki fungsi politik yaitu sebagai proyektor kekuatan dan pembangun kepercayaan, serta penghubung antara negara-negara Skandinavia dan sekutunya di Amerika Utara.

Selain itu, untuk menjaga kemampuan militer anggotanya dalam status siap, NATO dan negara-negara anggota secara teratur menggelar latihan militer. Operasi Loyal Arrow di Laplandia Swedia pada tahun 2009 dengan pasukan dari sepuluh negara anggota, lalu di daerah Narvik-Abisko pada 2010 melibatkan unit Norwegia dan Swedia, dan Operasi gabungan reguler Kanada Nanook dengan tentara Amerika dan Denmark, angkatan laut, angkatan udara dan pasukan khusus di Arktik Kanada. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa satu-satunya aset militer milik NATO adalah armada *Airborne Warning and Control System* (AWACS) yang berbasis di Geilenkirchen, Jerman. Saat ini sedang digunakan oleh ISAF di Afghanistan tetapi bisa juga dikerahkan di Kutub Utara dari pangkalan alternatif di dekat Trondheim. Pengawasan udara patroli di Islandia dan Negara Baltik diorganisir oleh NATO tetapi dilaksanakan oleh negara anggota secara bergilir.

Anggota Utara NATO tidak memiliki perspektif yang sama tentang masalah Arktik, mereka justru mengikuti kepentingan individu di negara masing-masing. Namun, mereka ingin NATO dan anggotanya bersama-sama mengikuti kebijakan Arktik yang proaktif dan menunjukkan kehadiran yang kuat di wilayah tersebut, serta memproyeksikan kekuatan dan menyediakan pencegahan strategis. Aliansi juga terus melayani penting fungsi politik seperti stabilisasi regional, kehadiran udara dan maritim, dll. Tugas-tugas ini telah diperkuat oleh konsep strategis baru pada perluasan kerjasama dengan organisasi lain. Saat ini, ancaman militer terhadap kedaulatan, keamanan dan integritas teritorial sangat tidak mungkin. Dengan demikian, aliansi perlu dipersiapkan untuk mengatasi perubahan iklim Arktik, terutama jika sangat mempengaruhi postur pertahanan anggota dan perencanaan operasional aliansi (Haftendorn, 2011).

**Reviu 4:** Artikel yang ditulis oleh Thomas E. Rotnem pada tahun 2016 yang berjudul **“*Putin’s Arctic Strategy*”**.

Pada artikel ini menjelaskan bahwa Vladimir Putin memberikan pandangannya pada tahun 2013 bahwa *Northern Sea Route* (NSR) merupakan asset geo-strategis. Rusia memulai melakukan patroli Angkatan laut regular di sepanjang jalur pelayaran Arktik. Strategi lain Rusia juga untuk mengeksploitasi kekayaan mineral dan hidrokarbonnya. Oleh karena itu, Putin memberikan pernyataan bahwa *“For us, the Arctic opens a new page in our history, which we shall call the epoch of industrial breakthrough, with heady economic and infrastructural development”*.

Setelah tindakan aneksasi Krimea pada tahun 2014, tindakan Rusia di kawasan Arktik dilakukan survey, dan sekitar 42% orang Rusia menganggap tindakan tersebut seperti kebangkitan Uni Soviet. Artikel ini juga menyebutkan bahwa setidaknya sejak 2008, NATO telah menginvestasikan aktivitasnya di kutub utara, dan Putin yakin bahwa aliansi barat akan terus menembus wilayah tersebut, sehingga Rusia yang menganggap bahwa Arktik merupakan bagian wilayah dari Uni Soviet mengambil tindakan asertif terhadap NATO atau aliansi barat, karena NATO memandang Arktik sebagai kunci pemulihan keseimbangan geopolitik. Oleh sebab itu, Amerika Serikat dan kekuatan NATO terpaku pada wilayah tersebut. Rusia melakukan tindakan seperti memberikan penangkal nuklir yang terletak di wilayah Arktik.

Negara-negara Skandinavia juga telah menciptakan militer mereka sendiri di dalam NATO untuk melindungi kepentingan mereka di zona Arktik, mereka melakukan latihan anti-Rusia yang diadakan secara teratur. Karena tindakan negara Skandinavia berserta NATO ini menyebabkan langkah Rusia untuk meningkatkan keamanan Arktik adalah sebuah bentuk proporsi Rusia dalam menanggapi aliansi Barat. Artikel ini memberikan inforamasi juga bahwa Kepala Staf Jenderal Valeri Gerasimov menyatakan bahwa dalam menanggapi aktivitas atau kegiatan militer aliansi barat, fokus khusus militer Rusia pada tahun 2015 tidak hanya di Krimea dan Kaliningrad Oblast, tetapi juga di wilayah Kutub Utara. Rusia melakukan aktivitas militer di Arktik pada tanggal 16 Maret 2015 selama lima hari, yang mencakup 80.000 pasukan, 65 kapal perang, 220 pesawat tempur, dan 5 kapal selam (Rotnem, 2018).

* 1. Kerangka Teoritis/ Konseptual
     1. Realisme Ofensif

Paradigma Neorealisme memiliki sebuah teori yang dikemukakan oleh John J. Mearsheimer yaitu Realisme Ofensif. Beliau merupakan penulis buku *The Tragedy of Great Power Politics*. Realisme Ofensif berasumsi bahwa dalam kondisi anarki, negara-negara besar cenderung berambisi untuk memperluas kekuasaannya. Strategi ekspansionis ditempuh sebagai cara untuk menjamin keamanan sebuah negara, oleh karena itu tidak ada jalan yang lebih baik untuk mengamankan diri, kecuali menjadi yang terkuat di antara negara-negara lain. Dengan demikian, Realisme Ofensif berpendapat bahwa tujuan tertinggi negara bukanlah sekedar aman, melainkan menjadi yang terkuat atau hegemon (Rosyidin, 2020). Realisme ofensif adalah teori pemaksimalan kekuasaan negara yang oportunistik. Negara selalu mencari kekuasaan agar mereka dapat menjamin keamanan negaranya dalam kondisi anarki dalam sistem internasional.

Mearsheimer sependapat dengan Kenneth Waltz bahwa anarki memaksa negara-negara untuk bersaing demi kekuatan. Namun, ia berpendapat bahwa negara-negara mencari hegemoni, bahwa mereka pada akhirnya lebih asertif dari pada yang digambarkan oleh Waltz (Jackson, R.; Sørensen, 2015). Seperti kaum Realis yang lain, Mearsheimer juga percaya bahwa akan selalu ada perjuangan antara negara-negara kuat dalam sistem Internasional, konflik akan selalu ada dalam setiap kekuatan. Mearsheimer menganggap bahwa distribusi kekuatan militer di antara kekuatan besar sangat penting dalam hal perang. Jika kekuatan besar memiliki keunggulan atas para pesaingnya, kemungkinan besar ia akan berperilaku asertif karena memiliki kemampuan untuk melakukannya. Namun, jika menghadapi yang kuat, cenderung mempertimbangkan tindakan ofensif dan lebih cenderung fokus untuk mempertahankan keseimbangan kekuatan yang ada (Mark V. Kauppi; Paul R. Viotti, 2019). Ada juga pendapat lain dari Fareed Zakaria selaku penulis buku *From Wealth to Power* bahwa kebijakan ekspansionis didorong oleh persepsi pembuat kebijakan yang melihat adanya peningkatan dalam hal kekuatan negara. Jadi, semakin besar kapabilitas nasionalnya, maka semakin besar peluang bagi pemerintah untuk melakukan politik ekspansionis.Untuk menjadi hegemon, sebuah negara harus memenuhi tiga syarat: ia harus menjadi hegemon regional, memperoleh kekayaan dan kekuatan tanah, dan mengembangkan senjata nuklir. Masing-masing mewakili langkah menuju kekuatan, dan kekuatan terutama dicapai melalui perang, pemerasan, umpan dan strategi berdarah, dan pertumpahan darah. Menurut realisme ofensif, konflik harus tetap konsisten untuk pasangan kekuatan utama, tidak peduli periode atau zaman. Perdamaian seharusnya tidak lebih umum selama periode waktu tertentu. Realisme Ofensif dapat menjelaskan teritorial konflik. Negara hanya bertindak dengan cara ofensif ketika terancam sengketa wilayah (Valeriano, 2009).

* + 1. Politik Internasional

K.J. Holsti mengemukakan dalam bukunya yang berjudul *“Politic International”* bahwa politik internasional adalah suatu pemahaman akan pola perilaku suatu negara terhadap lingkungan di luar negara/sistem, yang mana perilaku tersebut adalah reaksi atas Tindakan/aksi dari negara lain. Dalam pola interaksi tersebut, tercakup unsur-unsur pendukung perilaku suatu negara, yang mana diantarannya adalah unsur power, kepentingan, dan Tindakan politik internasional yang cenderung berorientasi pada respon atas sistem internasional dan perilaku para aktor dalam suatu konflik/fenomena politik internasional. Sehingga dengan kata lain, politik internasional berbicara mengenai hubungan dua arah antar aktor, yakni adanya aksi dan reaksi (K.J. Holsti, 1992).

Politik internasional adalah suatu gambaran akan aktivitas interaksi dalam hubungan internasional. Di dalam interaksi tersebut dibahas banyak hal terkait dengan kepentingan para aktor di dalamnya, yang mana termuat nilai-nilai sosial politik dan ekonomi, dengan orientasi Kerjasama dan juga dapat berupa konflik. Di dalamnya terdapat klasifikasi oleh negara terhadap negara lain, dengan adanya negara yang dianggap sebagai kawan dan lawan. Pemikir realist, Hans J. Morgenthau sendiri menilai bahwa dalam politik internasional termuat suatu upaya negara untuk *“struggle for power”* sebagai suatu sifat alamiah dari entitas negara. Power dalam pandangannya berbicara mengenai *”men control over the minds and actions of other men”* (Morgenthou, 1973)**.**

Politik internasional memiliki substansi mengenai segala keadaan politik dalam sistem internasional yang diejawantakan oleh interaksi antar aktor dengan bentuknya dapat berupa diplomasi, hubungan antar negara, dan konflik yang dilatarbelakangi oleh kepentingan antar aktor. Hubungan internasional yang terjadi di dalamnya mencakup negara, bangsa, dan kelompok negara/bangsa, yang membentuk suatu proses dan pola hidup serta Tindakan manusia.

* + 1. Politik Luar Negeri

Konsep politik luar negeri pada dasarnya merupakan suatu gambaran kebijakan negara atas negara lain di dalam pola komunikasi dan interaksi di ruang lingkup internasional. Politik luar negeri dimaksudkan untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Di dalam politik luar negeri terkandung perangkat nilai, sikap, formula, serta ada arah dan tujuan yang mana semua perangkat itu dimaksudkan untuk mempertahankan, memajukan, dan mengamankan kepentingan nasional negara tersebut. Henry Kissinger menjabarkan politik luar negeri sebagai *“foreign policy begins when domestic policy ends”* (Yani et al., 2007). Hal ini berarti bahwa dalam memahami politik luar negeri, kita dihadapkan pada ruang antara dimensi domestik dan dimensi internasional dari entitas negara. Pemahaman politik luar negeri dalam gambaran suatu sistem dengan dimensi di atas, dapat dijabarkan lebih lanjut dengan memahami bahwa terdapat suatu injeksi dari dimensi domestik atau dalam negeri dan juga luar negeri sebagai sebuah masukan atau input, yang mana hal tersebut mempengaruhi perilaku negara dan mengarahkan negara untuk mempersepsikan input tersebut dalam sebuah produk kebijakan dalam proses pengambilan keputusan yang pada akhirnya akan mengarah kepada output berupa kebijakan. Kebijakan luar negeri dimaksudkan untuk mencapai kepentingan, arah, dan tujuan nasional secara normatif, namun dalam prosesnya, pengambilan keputusan dan penentu kebijakan tersebut tetap ditentukan oleh siapa yang menjadi pemimpin negara pada saat itu (Mochtar Mas’oed, n.d.). Terdapat tiga kriteria untuk menjabarkan tujuan politik luar negeri menurut K.J. Holsti, yakni adanya nilai, sebagai tujuan dari para pembuat keputusan, jangka waktu dalam proses pencapaian tujuan dari para pemangku kebijakan, serta tipe tuntutan negara terhadap negara lain (Yani et al., 2007).

* + 1. Regionalisme

Studi tentang regionalism mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini kemudian membagi regionalism ke dalam dua konsep yang berbeda, yakni regionalisme lama dan regionalism baru. Dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan regionalisme baru sebagai salah satu kerangka konseptual untuk menjelaskan masalah yang ada. Dalam pendekatan regionalisme baru, terdapat suatu pemahaman yang manggambarkan bagaiamana sejatinya konsep Kawasan merupakan suatu produk yang terbangun dalam proses transformasi global. Hal ini menjelaskan bahwa Kawasan bukanlah suatu produk yang statis, melainkan bersifat dinamis dalam perkembangannya, dan juga bersifat adaptif serta terbuka terhadap adanya perubahan (Mary Farrell, Björn Hettne, n.d.).

Regionalisme telah dipandang sebagai suatu bentuk integrase yang di dalamnya terjadi integrase dalam berbagai lini kehidupan, di antaranya terjadi integrase dalam bidang ekonomi, budaya, politik, dan sosial. Hal inilah yang kemudian membuat pemahaman tentang regional menjadi semakin luas. Dalam regionalism terdapat suatu tujuan strategis, membentuk koherensi dan identitas daerah (Mary Farrell, Björn Hettne, n.d.). Dalam regionalisme, terdapat beberapa aktor dalam sistem internasional yang terlibat dan mengambil bagian di dalamnya antara lain negara, non-negara, organisasi internasional, dan juga kelompok sosial. Secara umum, regionalisme dapat dipahami sebagai suatu fenomena yang didasari pada projek ideologis (Mary Farrell, Björn Hettne, n.d.).

Adapun dalam penelitian ini mengkaji Kawasan Arktik. Kawasan ini merupakan bentangan Samudra yang memiliki luas 14.056.00 Km2 dan di sekitarnya terdapat beberapa negara seperti Rusia, Kanada, dan Alaska. Kawasan ini secara administratif dibagi kepada setiap negara dalam ruang lungkar Arktik dengan landasan hukumnya yakni *The Svalbard Treaty* dalam *Status of Spitsbergen* yang ditandatangani di Paris pada 1920 (Putra & Ii, 2017). Kawasan ini merupakan salah satu Kawasan dengan kualitas dan kekayaan sumber daya alam yang banyak, diantaranya berupa mineral, gas alam dan minyak yang masih belum dimanfaatkan.

* + 1. Geopolitik

Geopolitik dan hubungan internasional selalu menjadi bagian integral untuk mengamankan akses kepada sumber daya global. Perjuangan untuk mengamankan sumber daya ini mendorong politik Internasional. Geopolitik dan hubungan internasional terkait erat dengan energi dan keamanan mineral karena tiga alasan utama. Yang pertama adalah fakta fisik bahwa bahan bakar fosil dan mineral didistribusikan secara tidak merata di seluruh dunia dan, karena untuk distribusi yang tidak merata ini, beberapa negara dan wilayah secara nyata lebih banyak memiliki sumber daya dari negara yang lain. Yang kedua adalah bahwa sumber daya ini sangat penting penting bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi global dan diperdagangkan secara internasional. Faktor ketiga adalah anarkis yang kaum realis bilang itu adalah sifat politik internasional, karena tidak adanya pemerintahan global yang otoritatif, kekuasaan dan perilaku negara seringkali cenderung menentukan hasil politik dan ekonomi (Dannreuther, 2013).

Geopolitik cenderung mengacu kepada isu *high politics* yang mana termuat distribusi dan kontrol atas ruang publik, dengan di dalamnya mengandung sumber daya alam, masyarakat serta lingkungan dengan cakupan yang besar. Bottelier mengemukakan bahwa geopolitik itu sendiri merupakan sebuah turunan dari pendekatan realis dalam studi hubungan internasional, meskipun geopolitik tidak hanya spesifik berbicara mengenai kepemilikan kekuasaan layaknya pendekatan realism, tetapi juga berbicara mengenai ruang dimana kekuasaan yang ada didalamnnya dan menjalankan perannya. Dalam beberapa hal, geopolitik mempunyai asumsi dasar antaranya adalah negara, dalam hal ini dianggap sebagai sebuah entitas politik tertinggi yang dalam mencapai kepentingan nasionalnya harus bersaing dengan negara lain. Adapun power dalam geopolitik berbicara mengenai lokasi geografis, populasi dan sumber daya alam. Sehingga, geopolitik dapat dikatakan sebagai suatu analisis interaksi antara suatu keadaan geografis dan proses politik yang terjadi di dalam hubungan internasional (Dalby, n.d.).

* + 1. Regional Security Complex Theory

Keamanan dapat didefinisikan sebagai rasa aman dari sebuah ancaman, baik itu ancaman dari internal maupun eksternal. Konsep keamanan akan didominasi oleh militer. Dalam pandangan marxis berbicara mengenai keamanan akan berpengaruh kepada aspek lain atau dapat diartikan sebagai efek domino. Dalam memandang keamanan diperlukan analisis yang lebih luas, oleh karena itu Keamanan akan berkaitan dengan aspek lain, seperti Militer, Politik, Ekonomi, Sosial dan Lingkungan (Buzan, 2007). Buzan memiliki pengembangan terkait keamanan dalam sistem internasional dengan membentuk sebuah teori RSC (*Regional Security Complex*). Buzan dan Wæver menyebutkan bahwa RSC direformasi untuk melepaskan fokus negara-sentris dan militer-politik dan untuk mengulangi konsepsi dasar yang sama untuk kemungkinan pelaku yang berbeda dan beberapa sektor keamanan, oleh karena itu Buzan dan Wæver mendefinisikan RSC sebagai “*a set of units whose major processes of securitisation, desecuritisation, or both are so interlinked that their security problems cannot reasonably be analysed or resolved apart from one another*” (Buzan, Barry; Wæver, 2004).

RSC sangat berguna karena dua alasan. Pertama, memberitahu bahwa diperlukan tingkat analisis yang sesuai dalam studi keamanan. Kedua, dapat mengatur studi empiris. RSC didefinisikan oleh pola persahabatan dan permusuhan yang tahan lama dengan mengambil bentuk subglobal, pola saling ketergantungan keamanan yang koheren secara geografis. Untuk Sebagian besar negara dalam sistem internasional, tingkat regional adalah yang paling penting untuk menganalisis keamanan, tingkat regional sangat penting dalam membentuk pilihan atau memproyeksiskan pengaruh dan persaingan mereka ke dalam sistem lainnya. Teori ini dikembangkan untuk komunitas keamanan, salah satunya keamanan kolektif yang dimiliki oleh NATO.

Dalam RSC kita akan berbicara mengenai *Amity* yang didefinisikan sebagai pola interaksi dalam hubungan internasional yang akan mengarah pada kerjasama, dan *Enmity* yang berarti pola interaksi dalam hubungan internasional yang sifatnya konfliktual. Berbicara mengenai Arktik, kawasan ini tidak hanya melibatkan negara-negara yang berada di sekitar kawasan tersebut (Russia, Norwegia, Kanada, Amerika Serikat, dan Denmark). Kawasan ini melibatkan aktor di luar wilayah Arktik yang merupakan anggota NATO seperti Jerman, Inggris, dll.

* + 1. Russia’s Arctic Strategy

Kepentingan Rusia di dalam Arktik yaitu ekspoitasi mineral dan sumber daya hayati dalam *Arctic Zone Russia’s Federation* (AZRF). Wilayah ini adalah penghasil gas Rusia yang paling produktif (95 persen dari total produksi Rusia), dan minyak (sekitar 70 persen). Ahli geolog Rusia telah menemukan sekitar 200 deposit minyak dan gas di ARZF yang berada disekitar laut Barents dan Kara. Industri pertambangannya menghasilkan berlian primer sekitar (99 persen dari total produksi Rusia), platinum (98 persen), nikel dan kobalt (lebih dari 80 persen), kromium dan mangan (90 persen), tembaha (60 persen), antimon, timah, tungsten, logam langka (antara 50 sampai 90 persen), dan emas (sekitar 40 persen). Beberapa gerakan yang dilakukan Rusia di Kutub Utara selama dekade terakhir telah memicu reaksi keras dari negara regional lainnya (Sergunin & Konyshev, 2018).

Beberapa negara barat menganalisis dan percaya bahwa Rusia mengutamakan instrument militer koersif untuk melindungi kepentingan nasionalnya di Kutub Utara yang dapat mengarah pada militerisasi dan bahkan konflik militer di High North. Rusia bersikeras bahwa niatnya sebagaimana diartikulasikan dalam Dokrtin Arktik tahun 2008 dan 2013. Kremlin menekankan bahwa minat utamanya di Arktik adalah pengembangkan AZRF, yang kaya akan sumber daya alam. Kremlin juga menyatakan bahwa mereka tidak mengejar kebijakan revisionis di kutub utara, melainkan ingin menyelesaikan semua perselisihan di wilayah dengan cara damai, dengan mengandalkan hukum internasional dan organisasi internasional seperti PBB atau UNCLOS. Selain itu, jika es Arktik terus mencair seiring dengan perubahan iklim yang terjadi, Rusia akan mendapatkan keuntungan yang besar dari pengembangan eksploitasi *Northern Sea Route* (NSR) yaitu rute pelayaran antara pelabuhan eropa dan asia timur, juga dari pelabuhan domestik yang menghubungkan laur Arktik dan pelabuhan sungai Siberia dengan eropa.

Secara umum, kebijakan Arktik adalah kombinasi antara pendekatan hard-power dan soft-power. Pada satu sisi, Rusia benar-benar tegas dengan klaimnya terhadap Landas Kontinen Arktik seperti penanaman bendera di Lomonosov Ridge pada tahun 2007 dan mengajukan kembali perluasan zona wilayah laut kepada UNCLOS pada tahun 2015. Program militer rusia di Arktik dilihat terlalu berlebihan dan mengganggu stabilitas keseimbangan di kawasan tersebut. Rusia tertarik untuk mengembangkan angkatan bersenjata yang kuat di wilayah Utara, tetapi rencanya untuk memodernisasi angkatan udara dan menciptakan kembali angkatan laut yang kuat, memperbarui armada kapal selam strategisnya. Oleh karena itu, tujuan militer Rusia semakin meningkat untuk mempertahankan kepentingan ekonomi di kawasan dan mengkonsolidasikan kontrolnya atas wilayah AZRF. Jadi, di satu sisi Rusia memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi dan politik Rusia di High North, di sisi lain Rusia menegaskan bahwa pihaknya terbuka untuk kerjasama yang saling menguntungkan dengan mitra asing dalam memanfaatkan alam Arktik, seperti sumber daya, pengembangan Rute Laut Utara, dan memajukan penelitian lingkungan dan perlindungan di kawasan Arktik (Sergunin & Konyshev, 2018).

* 1. Hipotesis Penelitian

Setelah melakukan review melalui tinjauan Pustaka dan memasukan konsep teoritis ke dalam tugas akhir ini, maka penulis memiliki hipotesis yang menganggap bahwa konstestasi geopolitik antara negara-negara NATO dengan Rusia hanya sebatas gertakan, namun “**Dengan adanya tindakan asertifitas Rusia yang memicu ketegangan geopolitik di kawasan Arktik, maka NATO meningkatkan aktivitas militernya untuk menunjukan kehadiran mereka dalam membendung tindakan asertifitas Rusia di kawasan Arktik”**

* 1. Verifikasi Variabel dan Indikator

Untuk membantu dan mempermudah penulis dalam melakukan analisis penelitian lebih lanjut, maka penulis membuat verifikasi variabel dan indikator sebagai berikut:

Tabel 2.1 Verifikasi Variabel dan Indikator

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel Dalam Hipotesis (Teoritis)** | **Indikator**  **(Empirik)** | **Verifikasi**  **(Analisis)** |
| **Variabel Bebas**  Tindakan asertifitas Rusia di kawasan Arktik dapat mengancam stabilitas keamanan jalur laut dan kedaulatan negara-negara di sekitar Arktik | 1. Klaim Rusia di Lomonosov Ridge dan menaruh atau menancapkan bendera Rusia di beberapa wilayah Arktik. 2. Rusia meningkatkan pangkalan militernya di kawasan Arktik. | Data yang menjelaskan klaim Rusia di Lomonosov Ridge dan tindakan Rusia menancapkan atau menaruh bendera di wilayah Arktik sebagai bukti wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah kedaulatan Rusia.  <https://www.arctictoday.com/russia-extends-its-claim-to-the-arctic-ocean-seabed/>  Data yang menunjukan peningkatan dan penunjukan kehadiran militer Rusia di kawasan Arktik.  <https://www.bbc.com/indonesia/vert-fut-42464464>  Putra, Ii - 2017 - Kebijakan pertahanan rusia terhadap ancaman nato dalam isu sengketa wilayah di arktik |
| **Variabel Terikat**  Respon *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) dalam menanggapi tindakan asertifitas Rusia di kawasan Arktik | 1. Peningkatan aktivias militer untuk menunjukan kehadiran NATO di wilayah Arktik serta membendung tindakan asertifitas Rusia. 2. Menjaga kedaulatan anggota NATO dan kepentingan negara anggota NATO yang berada di wilayah Arktik. | Data yang menjelaskan respon militer NATO untuk menunjukan kehadiranya kepada Rusia.  Connolly, G. E. (2017). NATO and the security in the Arctic. *NATO Parliamentary Assembly*, *October*, 14.  <https://international.sindonews.com/berita/1344079/41/nato-bakal-gelar-latihan-militer-terbesar-sejak-era-perang-dingin>  Data yang menjelaskan NATO menjaga kedaulatan negara Arktik yang merupakan anggota NATO.  Haftendorn, H. (2011). NATO and the Arctic is the Atlantic alliance a cold war relic in a peaceful region now faced with non-military challenges European Security, 20(3), 337–361. |

* 1. Skema dan Alur Penelitian

Samudra Arktik

NATO

Rusia

Keamanan Kolektif

Russia’s Arctic Strategy

Bersama-sama membendung ancaman

Asertifitas Militer Rusia

Kontestasi Geopolitik